

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala dalam proses penerapannya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Aktor yang Terlibat

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kedondong telah melibatkan berbagai aktor dari unsur internal (guru, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah) maupun eksternal (Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, dan masyarakat). Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya seimbang karena peran aktor eksternal masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Hambatan utama pada aspek ini ialah belum optimalnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan SDM dan anggaran di tingkat OPD, sehingga tanggung jawab pelaksanaan lebih banyak dibebankan kepada pihak sekolah. Penyebabnya bersumber dari belum adanya mekanisme formal kolaborasi yang terstruktur antar

lembaga serta minimnya dukungan operasional lintas sektor secara berkesinambungan.

2. Kejelasan Tujuan

Tujuan Program Sekolah Ramah Anak secara umum telah dipahami dengan baik oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah, yang tercermin melalui penerapan nilai-nilai ramah anak di lingkungan belajar serta adanya program PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang mendukung penerapan SRA dalam aspek kesehatan pangan anak. Namun, pemahaman tersebut belum merata di kalangan seluruh guru. Hambatan muncul karena tidak semua guru mendapatkan pelatihan langsung akibat keterbatasan SDM, waktu, dan anggaran, sehingga sosialisasi program hanya dilakukan sesekali. Akibatnya, sebagian pelaksana masih menilai program sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai perubahan paradigma pendidikan. Hambatan ini bersifat struktural dan kultural, yaitu belum adanya sistem sosialisasi yang berkelanjutan dan belum tertanamnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai SRA dalam budaya sekolah.

3. Perkembangan dan Kerumitan Program

Secara kelembagaan, SD Negeri Kedondong mampu menyesuaikan kapasitasnya dengan beban pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Namun, pada tingkat operasional masih terdapat kerumitan, terutama dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus

(ABK) yang memerlukan perhatian individual dan kompetensi khusus dari guru. Ketiadaan tenaga pendamping serta terbatasnya pelatihan spesifik menyebabkan beban kerja guru menjadi tinggi dan berdampak pada optimalitas layanan inklusif. Pelaksanaan SRA telah berjalan cukup baik, tetapi tetap membutuhkan dukungan SDM profesional dan penguatan kapasitas dari pemerintah daerah agar pemenuhan hak-hak ABK dapat terlaksana secara maksimal.

4. Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan

Secara konseptual, Program Sekolah Ramah Anak memerlukan koordinasi lintas sektor antarunit pemerintahan. Namun, di Kabupaten Banyumas, partisipasi antar-OPD dalam implementasinya masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi secara formal. Kegiatan lintas sektor seperti pendampingan, monitoring, dan supervisi dilakukan secara insidental dan sering kali bergabung dengan program lain seperti Sekolah Sehat atau BOS. Hambatan utamanya ialah belum adanya wadah resmi seperti tim lintas sektor atau gugus tugas SRA di tingkat daerah. Penyebabnya bersifat struktural, yakni lemahnya kelembagaan koordinatif dan keterbatasan dukungan kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan SRA secara sistemik.

5. Faktor-Faktor Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kedondong masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak

sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sekolah, meliputi faktor struktural, kultural, dan operasional. Dari sisi struktural, belum optimalnya koordinasi antar-OPD, minimnya tenaga pendamping khusus, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Dari sisi kultural, masih terdapat persepsi bahwa SRA hanyalah formalitas, serta budaya kekerasan verbal dan disiplin keras yang belum sepenuhnya hilang. Dari sisi operasional, keterbatasan waktu guru, tingginya beban administrasi, dan kurangnya fasilitas ramah disabilitas turut memperlambat capaian program. Dengan demikian, penyebab hambatan pada aspek ini bersumber dari lemahnya dukungan sistemik di luar kendali sekolah dan belum terbangunnya budaya ramah anak secara menyeluruh di lingkungan pendidikan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa implikasi dan saran yang dapat dikemukakan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian pada setiap aspek yang telah dianalisis.

1. Aktor yang terlibat

Koordinasi lintas sektor belum optimal karena peran OPD masih insidental dan terbatas SDM serta anggaran. Disarankan dibentuk forum koordinasi atau tim lintas sektor agar kolaborasi lebih terstruktur, serta diperkuat dukungan sumber daya dan pendanaan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada sekolah.

2. Kejelasan Tujuan

Pemahaman guru terhadap tujuan SRA belum merata akibat minimnya pelatihan dan sosialisasi. Disarankan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan disertai pembiasaan nilai-nilai ramah anak di sekolah agar pemahaman tidak sebatas administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya pendidikan.

3. Perkembangan dan Kerumitan Program

Keterbatasan tenaga pendamping dan kapasitas guru dalam menangani ABK berpotensi menurunkan efektivitas penerapan SRA, sehingga diperlukan dukungan SDM khusus dan pelatihan berkelanjutan dari pemerintah daerah agar layanan inklusif dapat berjalan optimal.

4. Partisipasi Pada Semua Unit Pemerintahan

Partisipasi antar-OPD masih parsial karena belum ada wadah koordinatif formal. Disarankan dibentuk gugus tugas lintas sektor dengan dasar hukum dan pembagian peran yang jelas agar koordinasi, pendampingan, dan monitoring SRA berjalan lebih sinkron dan berkelanjutan.

5. Faktor-Faktor Tidak Terkendali Yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi terhambat oleh keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, serta budaya disiplin keras yang belum hilang. Disarankan penguatan kebijakan daerah, peningkatan fasilitas ramah

disabilitas, dan keterlibatan masyarakat agar budaya ramah anak dapat tumbuh secara menyeluruh.

